

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora  
Skripsi Januari 2023  
Devi Riyanti  
114191001

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA NOTARIS KABUPATEN SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**ABSTRAK**

Notaris merupakan jabatan khusus dari negara dituntut untuk tunduk pada undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris, akan tetapi masih banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat yang mana dalam melakukan tugas jabatannya pasti pernah melakukan kesalahan maka perlu adanya Majelis Pengawas Daerah sebagai garda depan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi di Majelis Pengawas daerah Kabupaten Semarang. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugas mengacu pada Peraturan Menteri, keputusan menteri dan untuk dasar tindakannya mengacu pada undang-undang jabatan notaris pada Pasal 70 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kendala yang di hadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Di Kabupaten Semarang masih terdapat beberapa Notaris yang belum memiliki kantor tetap, banyak Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan, atau menyampaikan laporan tidak tepat waktu sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris kesulitan dalam mendata dan merekapitulasi Protokol Notaris dan masih terdapat beberapa Notaris yang belum memiliki kantor tetap.

**Kata Kunci:** Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Kabupaten Semarang, Jabatan Notaris.

Ngudi Waluyo University  
Law Study Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities  
Januari 2023 Thesis  
Devi Riyanti  
114191001

**THE ROLE OF REGIONAL ASSEMBLY OF SUPERVISORY IN IMPLEMENTING GUIDANCE AND SUPERVISION OF THE NOTARY OF SEMARANG REGENCY ACCORDING TO LAW NO. 2 OF 2014 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 30 OF 2004 CONCERNING THE POSITION OF NOTARY**

**ABSTRACT**

Notary is a special position of the state required to comply with the notary office law and notary code of ethics, but there are still many phenomena that occur in society where in carrying out their duties they must have made mistakes, so there is a need for a Regional Supervisory Council as the vanguard in carrying out Development and Supervision of notaries to prevent violations of the authority of a notary's office. The method in this study is empirical juridical, with the main data being processed from interviews and observations at the Regional Supervisory Board of Semarang Regency. The role of the Regional Supervisory Council in fostering and supervising notaries in the Semarang Regency area in carrying out their duties refers to Ministerial Regulations, ministerial decisions and for the basis of action refers to the notary office law in Article 70 Law No. 2 of 2014 amendment to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public Obstacles faced by the Notary Regional Supervisory Council in exercising their authority. In Semarang Regency there are still several Notaries who do not have permanent offices, many Notaries who neglect to collect monthly reports, or submit reports not on time so that the Notary Regional Supervisory Board has difficulty in recording and recapitulating Notary Protocols and there are still several Notaries who do not have a permanent office.

***Keywords:*** *Regional Supervisory Council, Notary, Semarang Regency.*